

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan. Kerangka teori modal manusia menyatakan bahwa investasi pada pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas individu. Dalam penelitian ini, penekanan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks Pembangunan manusia.

Kualitas sumber daya manusia tidak semata ditunjukkan oleh ijazah, melainkan terutama oleh kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri dan layanan. Konsep kesiapan kerja (*employability*) menekankan kemampuan memperoleh, mempertahankan, dan berpindah pekerjaan sesuai dinamika pasar kerja, yang dibangun dari kombinasi keterampilan teknis, literasi digital, komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah.²

Teori modal manusia (*human capital*) yang dipelopori Becker dan Schultz³ menempatkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja sebagai bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas individu. Ketika produktivitas meningkat, probabilitas memperoleh pekerjaan yang layak juga meningkat. Dalam kerangka ini, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di Jombang menjelaskan mengapa transisi ke pekerjaan formal berjalan lambat.

² Sapitri Januariyansah and others, 'Meta Analisis Pengaruh Employability Skills Terhadap Kesiapan Kerja', 22.2 (2022), 33–39.

³ Shofwan Roziq and Perdana Alqodiri, 'Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', 4.1 (2025), 2199–2206.

Klasifikasi pengangguran dalam literatur ekonomi secara friksional, struktural, siklikal, dan teknologi mengarah pada perlunya kebijakan yang disesuaikan dengan akar persoalan. Pengangguran friksional berkaitan dengan pencarian kerja yang memerlukan waktu; pengangguran siklikal terkait siklus bisnis; pengangguran teknologi muncul akibat otomasi; sementara pengangguran struktural berkaitan dengan ketidakcocokan keterampilan dengan permintaan industri. Indikasi mismatch di Jombang menunjukkan dominannya unsur struktural.

Model pertumbuhan *endogen* (yang berasal dari dalam sistem dan ditentukan oleh mekanisme internal) menyoroti peran akumulasi pengetahuan dan inovasi sebagai motor produktivitas jangka panjang. Dalam konteks lokal, ekosistem pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan abad ke-21 literasi data, kemampuan kolaborasi, dan pemecahan masalah akan memperkuat kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga lebih adaptif terhadap perubahan teknologi.

Dari perspektif kebijakan pendidikan dan pelatihan, pendekatan *competency based training* (pelatihan berbasis kompetensi dengan kurikulum dan asesmen berfokus pada standar kemampuan terukur) dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) relevan untuk memastikan bahwa hasil pelatihan dapat diakui pasar kerja. Integrasi *competency based training* dengan pemagangan industri memberi jembatan nyata dari pelatihan ke penempatan kerja.

Pemerintah pusat telah menjalankan berbagai program, seperti Kartu Prakerja⁴ dan penguatan pendidikan vokasi melalui link and match industri. Program ini menyediakan pelatihan berbasis platform dan bantuan biaya, namun efektivitasnya pada tingkat daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk mengarahkan peserta pada pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja lokal.

Wahjusaputri, Nastiti, dan Liu melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan model teaching factory hibrida berbasis tata kelola sekolah untuk meningkatkan kesiapan kerja siswa vokasi. Hasilnya Model yang dikembangkan efektif meningkatkan keterampilan kesiapan kerja yang relevan dengan industri.⁵

Naufalin, Indriayu, dan Sulistyandari melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan literasi digital terhadap kesiapan kerja mahasiswa diploma. Hasilnya Magang berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja; literasi digital memperkuat efeknya.⁶

Anggraini dkk. melakukan penelitian dengan tujuan untuk untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Program Kartu Prakerja: Kerangka Umum dan Pelaksanaan.

⁵ Sintha Wahjusaputri, Tashia Indah Nastiti, dan Yingdong Liu (2024), Jurnal Pendidikan Vokasi 14(1):53–62.

⁶ Lina Rifda Naufalin, Mintasih Indriayu, dan Sulistyandari (2024), Jurnal Pendidikan Vokasi 14(2):208–219.

kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Hasilnya Kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terbuka; indeks pembangunan manusia tidak signifikan.⁷

Vidiastuti dan Purwanto melakukan penelitian dengan tujuan untuk untuk mengevaluasi manajemen *teaching factory* selama pandemi untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran kejuruan. Hasilnya Kemitraan sekolah yaitu industri menjadi kunci menjaga kesiapan kerja siswa vokasi.⁸

Bertolak dari uraian empiris, teoretis, dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menyajikan potret yang komprehensif mengenai bagaimana peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) berkontribusi pada penurunan pengangguran di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori berbasis data sekunder resmi, sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih presisi dan berdampak.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Pengangguran tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pembangunan nasional. Tingginya tingkat

⁷ Dessy Angraini dkk. (2023), *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7(1):672–676.

⁸ Y. Vidiastuti dan N. A. Purwanto (2021), *Jurnal Pendidikan Vokasi* 11(3):294–304.

pengangguran dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang menghambat stabilitas ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator utama yang menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan menjadi parameter penting dalam mengukur keberhasilan penyerapan tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia masih mengalami fluktuasi dan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar provinsi. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan struktur ekonomi, kualitas tenaga kerja, serta kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun sosial.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Provinsi	Tahun 2024
Aceh	5,655
Sumatera Utara	5,35
Sumatera Barat	5,77
Riau	3,775
Jambi	4,465
Sumatera Selatan	3,915
Bengkulu	3,14
Lampung	4,155
Kepulauan Bangka Belitung	4,24
Kepulauan Riau	6,665
DKI Jakarta	6,12
Jawa Barat	6,83
Jawa Tengah	4,585
DI Yogyakarta	3,36
Jawa Timur	3,965
Banten	6,85
Bali	1,83
Nusa Tenggara Barat	3,015
Nusa Tenggara Timur	3,095
Kalimantan Barat	4,53
Kalimantan Tengah	3,84
Kalimantan Selatan	4,045
Kalimantan Timur	5,445
Kalimantan Utara	3,955
Sulawesi Utara	5,915
Sulawesi Tengah	3,045
Sulawesi Selatan	4,545
Sulawesi Tenggara	3,155
Gorontalo	3,09
Sulawesi Barat	2,85
Maluku	6,035
Maluku Utara	4,095
Papua Barat	4,22
Papua Barat Daya	6,25

Papua	6,145
Papua Selatan	4,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2025⁹

Berdasarkan Tabel 1.1 data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi, terlihat bahwa kondisi pengangguran di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah. Perbedaan tingkat pengangguran ini mencerminkan adanya ketimpangan struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan masing-masing provinsi dalam menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja.

Secara umum, beberapa provinsi di Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Banten mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 6,85 persen, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 6,83 persen, Kepulauan Riau sebesar 6,67 persen, serta DKI Jakarta sebesar 6,12 persen. Tingginya tingkat pengangguran di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi yang relatif maju dan tingkat urbanisasi yang tinggi belum tentu mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Provinsi Bali memiliki tingkat pengangguran terendah sebesar 1,83 persen, diikuti oleh Papua Tengah sebesar 2,62 persen, Sulawesi Barat sebesar 2,85 persen, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang masing-

⁹ Badan Pusat Statistik, 'Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2024', *Jakarta*, 2025 <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI%3D/unemployment-rate-by-province.html>> [accessed 23 January 2026].

masing mencatat tingkat pengangguran sekitar 3 persen. Rendahnya tingkat pengangguran di provinsi-provinsi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, dan sektor informal, yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Di wilayah Sumatera, tingkat pengangguran juga menunjukkan variasi antar provinsi. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memiliki tingkat pengangguran di atas 5 persen, sementara provinsi seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dinamika ketenagakerjaan di wilayah Sumatera dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing provinsi.

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku mencatat tingkat pengangguran yang relatif tinggi, sementara provinsi lainnya menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh letak geografis, tetapi juga oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, serta kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan kerja.

Perbedaan tingkat pengangguran antar provinsi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional. Tingkat pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik diharapkan memiliki daya saing tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga mampu menekan tingkat pengangguran.

Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan strategis dalam menentukan kemampuan suatu perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dan menekan tingkat pengangguran. Dalam konteks pembangunan nasional, kualitas sumber daya manusia mencerminkan kemampuan penduduk dalam mengembangkan potensi ekonomi, beradaptasi dengan perubahan struktur produksi, serta berpartisipasi secara produktif dalam pasar kerja. Kualitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh capaian pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pembangunan manusia secara menyeluruh serta dinamika pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di suatu wilayah. Oleh karena itu, perbedaan kualitas sumber daya manusia antar daerah berpotensi menimbulkan variasi tingkat pengangguran yang cukup signifikan.

Dalam penelitian ini, kualitas sumber daya manusia direpresentasikan melalui tiga indikator utama, yaitu tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pendidikan mencerminkan kemampuan penduduk dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kapasitas perekonomian dalam menciptakan nilai tambah dan peluang usaha, yang pada akhirnya menentukan ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, IPM

menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang secara tidak langsung memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja.

Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Dalam beberapa kasus, daerah dengan capaian pendidikan dan pembangunan manusia yang relatif tinggi masih menghadapi tingkat pengangguran yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kualitas penduduk dan kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha, keterbatasan lapangan kerja formal, serta struktur perekonomian yang belum sepenuhnya berkembang menjadi faktor yang memperumit permasalahan pengangguran di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori pembangunan ekonomi sebagai landasan teoritis utama untuk menjelaskan hubungan antara kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengangguran. Menurut Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas manusia, tetapi juga pada perubahan struktur ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja secara luas. Dalam kerangka teori tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan sektor-sektor produktif agar mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan perspektif teori pembangunan ekonomi.

Tabel 1. 2 Statistik Pendidikan

(dalam persentase)

Provinsi	Rata Lama Sekolah
Aceh	9,95
Sumatera Utara	10,18
Sumatera Barat	9,72
Riau	9,69
Jambi	9,26
Sumatera Selatan	8,98
Bengkulu	9,4
Lampung	8,8
Kepulauan Bangka Belitung	8,78
Kepulauan Riau	10,65
DKI Jakarta	11,49
Jawa Barat	9,24
Jawa Tengah	8,47
DI Yogyakarta	10,23
Jawa Timur	8,69
Banten	9,55
Bali	9,87
Nusa Tenggara Barat	8,5
Nusa Tenggara Timur	8,48
Kalimantan Barat	8,28
Kalimantan Tengah	9,17
Kalimantan Selatan	9,02
Kalimantan Timur	10,22
Kalimantan Utara	9,58
Sulawesi Utara	10,02
Sulawesi Tengah	9,28
Sulawesi Selatan	9,22
Sulawesi Tenggara	9,74
Gorontalo	8,64
Sulawesi Barat	8,56

Di sisi lain, beberapa provinsi masih memiliki rata-rata lama sekolah yang relatif rendah. Provinsi Papua Tengah mencatat tingkat pendidikan terendah dengan rata-rata lama sekolah sebesar 6,17 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Kondisi serupa juga terlihat di beberapa provinsi lain seperti Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki rata-rata lama sekolah di bawah 8,5 tahun. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia.

Wilayah Pulau Jawa menunjukkan variasi tingkat pendidikan antar provinsi. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki rata-rata lama sekolah yang relatif tinggi, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun berada dalam satu kawasan geografis, capaian pendidikan antar provinsi masih dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial ekonomi, kebijakan daerah, serta akses terhadap fasilitas pendidikan.

Di kawasan luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, tingkat pendidikan juga menunjukkan pola yang beragam. Beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara memiliki rata-rata lama sekolah di atas 10 tahun, sementara provinsi lainnya masih berada di bawah angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata dan

masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Perbedaan tingkat pendidikan antar provinsi tersebut memiliki implikasi penting terhadap kondisi ketenagakerjaan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat membatasi kesempatan kerja dan meningkatkan risiko terjadinya pengangguran. Oleh karena itu, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Variasi rata-rata lama sekolah antar provinsi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih belum merata. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan penduduk, diharapkan kemampuan tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja juga semakin meningkat, sehingga dapat berkontribusi dalam menekan tingkat pengangguran.

Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen), 2024

(dalam persentase)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi
Aceh	3,3
Sumatera Utara	3,67

Sumatera Barat	2,95
Riau	2,21
Jambi	3,24
Sumatera Selatan	3,91
Bengkulu	3,32
Lampung	3,4
Kepulauan Bangka Belitung	-0,52
Kepulauan Riau	3,54
DKI Jakarta	4,78
Jawa Barat	3,94
Jawa Tengah	3,98
DI Yogyakarta	4,39
Jawa Timur	4,21
Banten	3,75
Bali	4,79
Nusa Tenggara Barat	3,7
Nusa Tenggara Timur	2,14
Kalimantan Barat	3,57
Kalimantan Tengah	3,13
Kalimantan Selatan	3,79
Kalimantan Timur	2,6
Kalimantan Utara	3,19
Sulawesi Utara	4,6
Sulawesi Tengah	8,66
Sulawesi Selatan	3,9
Sulawesi Tenggara	3,73
Gorontalo	2,89
Sulawesi Barat	3,22
Maluku	3,98

Maluku Utara	12,18
Papua Barat	18,89
Papua Barat Daya	2,04
Papua	2,79
Papua Selatan	3,08
Papua Tengah	2,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen), 2024.¹¹

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia belum berlangsung secara merata.

Secara umum, sebagian besar provinsi di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi positif, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Provinsi Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 18,89 persen, diikuti oleh Maluku Utara sebesar 12,18 persen dan Sulawesi Tengah sebesar 8,66 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi tersebut umumnya dipengaruhi oleh perkembangan sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan, industri pengolahan, dan proyek-proyek strategis yang berskala besar. Namun,

¹¹ Badan Pusat Statistik, 'Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2024', *Jakarta*, 2025 <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Tm10bFVGvklLMVF6UzBweFFuRm1XbWxaV0hCcVp6MDkjMyMwMDAw/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen-.html?year=2024>> [accessed 23 January 2026].

pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Di sisi lain, beberapa provinsi menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -0,52 persen, yang mengindikasikan terjadinya kontraksi ekonomi pada periode tersebut. Selain itu, provinsi seperti Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Papua mencatat pertumbuhan ekonomi di bawah 3 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam perekonomian daerah yang dapat memengaruhi kemampuan wilayah tersebut dalam menciptakan lapangan kerja.

Wilayah Pulau Jawa, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, umumnya mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3,9 hingga 4,8 persen. Stabilitas pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mencerminkan peran penting sektor industri, perdagangan, dan jasa dalam menopang perekonomian nasional.

Di wilayah luar Jawa, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola yang beragam. Beberapa provinsi di Kalimantan dan Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, sementara provinsi lainnya masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh struktur sektor unggulan, ketersediaan sumber daya alam, serta tingkat investasi yang masuk ke masing-masing wilayah.

Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa wilayah belum tentu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang sebanding. Dalam konteks ketenagakerjaan, kondisi ini menjadi penting untuk diperhatikan karena pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Oleh karena itu, variasi pertumbuhan ekonomi antar provinsi menjadi salah satu faktor penting yang perlu dikaji dalam menganalisis permasalahan pengangguran di Indonesia. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, berpotensi menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pengangguran secara komprehensif di Indonesia.

Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024

Provinsi	IPM
Aceh	75,36
Sumatera Utara	75,76
Sumatera Barat	76,43
Riau	75,67
Jambi	74,36
Sumatera Selatan	73,84
Bengkulu	74,91
Lampung	73,13
Kepulauan Bangka Belitung	74,55
Kepulauan Riau	79,89
DKI Jakarta	84,15

Jawa Barat	74,92
Jawa Tengah	73,87
DI Yogyakarta	81,62
Jawa Timur	75,35
Banten	76,35
Bali	78,63
Nusa Tenggara Barat	73,1
Nusa Tenggara Timur	69,14
Kalimantan Barat	71,19
Kalimantan Tengah	74,28
Kalimantan Selatan	75,19
Kalimantan Timur	78,79
Kalimantan Utara	73,41
Sulawesi Utara	75,68
Sulawesi Tengah	72,24
Sulawesi Selatan	75,18
Sulawesi Tenggara	73,62
Gorontalo	72,01
Sulawesi Barat	70,46
Maluku	73,4
Maluku Utara	71,84
Papua Barat	67,69
Papua Barat Daya	69,65
Papua	73,83
Papua Selatan	68,86
Papua Tengah	60,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut provinsi, terlihat bahwa kualitas pembangunan manusia di Indonesia masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, IPM sering digunakan sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah.

Secara umum, beberapa provinsi di Indonesia telah mencapai tingkat IPM yang relatif tinggi. Provinsi DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi sebesar 84,15, diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 81,62 dan Kepulauan Riau sebesar 79,89. Tingginya IPM di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa penduduk memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik. Kondisi ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sebaliknya, beberapa provinsi masih memiliki capaian IPM yang relatif rendah. Provinsi Papua Tengah mencatat IPM terendah sebesar 60,25, diikuti oleh Papua Barat sebesar 67,69, Papua Selatan sebesar 68,86, serta Nusa Tenggara Timur sebesar 69,14. Rendahnya IPM di provinsi-provinsi tersebut mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup yang layak bagi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah-wilayah tersebut.

Wilayah Pulau Jawa menunjukkan variasi capaian IPM antar provinsi. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki IPM yang relatif tinggi, sementara provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki IPM yang lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu kawasan geografis, kualitas pembangunan manusia antar provinsi masih dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial ekonomi, tingkat pembangunan, serta kebijakan pembangunan daerah.

Di kawasan luar Jawa, capaian IPM juga menunjukkan pola yang beragam. Beberapa provinsi di Kalimantan dan Sulawesi memiliki IPM pada kategori menengah hingga tinggi, sementara sebagian provinsi di kawasan Maluku dan Papua masih berada pada kategori rendah. Ketimpangan capaian IPM antar wilayah ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia belum berlangsung secara merata dan masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Perbedaan capaian IPM antar provinsi memiliki implikasi penting terhadap kondisi ketenagakerjaan. Kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari IPM berpengaruh terhadap kemampuan penduduk dalam berpartisipasi di pasar kerja. Provinsi dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih produktif, berpendidikan, dan sehat, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan. Sebaliknya, rendahnya IPM dapat membatasi kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan risiko terjadinya pengangguran.

Variasi capaian IPM antar provinsi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam memahami permasalahan pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu variabel yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini guna melihat keterkaitannya dengan tingkat pengangguran. Analisis mengenai pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran kualitas sumber daya manusia dalam menekan pengangguran di tingkat nasional.

Dengan berbagai paradigma di atas tentunya telah menjadikan peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Permasalahan pengangguran di Indonesia masih menunjukkan karakteristik yang kompleks dan beragam antar wilayah. Tingkat pengangguran terbuka antar provinsi masih memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan, yang mengindikasikan adanya ketimpangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Di sisi lain, tingkat pendidikan penduduk yang diukur melalui rata-rata lama sekolah belum merata antar provinsi, sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan tenaga kerja dalam memasuki dan bersaing di pasar kerja. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi juga menunjukkan variasi yang cukup besar, namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum tentu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang sebanding. Perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia antar provinsi semakin mencerminkan adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia diduga berkaitan dengan variasi tingkat pengangguran di Indonesia, namun hubungan antar variabel tersebut belum dianalisis secara empiris dan komprehensif.¹²

¹² Khairul Amri, Cut Dian Fitri, and Indina Tazkiya Lubis, ‘SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN : BUKTI DATA PANEL DI PROVINSI’, 57–66.

Batasan penelitian meliputi tidak digunakannya data primer melalui survei atau kuesioner, tidak dilakukannya pengukuran keterampilan individu secara langsung, serta tidak dievaluasinya efektivitas program secara eksperimental. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan disusun berdasarkan temuan deskriptif yang tetap memerlukan dukungan kajian lanjutan apabila hendak ditranslasikan menjadi program intervensi yang spesifik.

C. Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan tertentu yang mana secara spesifik menjawab dari rumusan masalah ini. Dalam penyusunan suatu rancangan penelitian wajib ditentukannya suatu rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu:

- 1) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia?
- 2) Apakah Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia?
- 3) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia?
- 4) Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
- 2) Untuk menguji Tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
- 3) Untuk menguji pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
- 4) Untuk menguji indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adanya kajian ini dalam pemecahan masalah maka diharapkan oleh peneliti dalam kajian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kaitannya dengan upaya penanggulangan pengangguran.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan kepada para pencari kerja dan masyarakat umum tentang pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat Menjadi sumber informasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang sinergi antara pendidikan,

pelatihan, dan penyediaan lapangan kerja yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa, serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan atau ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Objek penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia, sehingga data yang digunakan bersifat lintas wilayah (cross section). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi data tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan data dalam satu periode waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan data terbaru dari BPS. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti serta tidak menganalisis aspek kebijakan secara mendalam.

G. Penegasan Variabel

Penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar istilah–istilah yang penting dalam penelitian ini bisa dipahami dengan jelas.

1. Penegasan Konseptual

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Gary Dessler, kualitas sumber daya manusia adalah hasil dari proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pengembangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan SDM merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui berbagai program seperti pelatihan, pengembangan karir, dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan.¹³

b. Tingkat Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sukirno

¹³ Gary Dessler, dikutip dalam S.P. Irawan, "Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan", Universitas Faletahan, 2022, hlm. 4-5. <https://repo.unicimi.ac.id/501/1/24-07-149-EBOOK%20Pengembangan%20SDM%20yang%20Berkelanjutan.pdf>

mendefinisikan pengangguran sebagai seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang berdampak langsung pada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja yang tersedia di pasar.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, kualitas sumber daya manusia dioperasionalkan sebagai tingkat pendidikan rata rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi capaian pada indikator-indikator tersebut, semakin tinggi pula kualitas SDM yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat yang diteliti. Sementara itu, tingkat pengangguran dioperasionalkan sebagai persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja di wilayah penelitian pada periode tertentu, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik

¹⁴ Sukirno, Sadono. Makro Ekonomi: Teori Pengantar dan Aplikasinya, Edisi 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

(BPS). Definisi operasional ini memastikan bahwa variabel penelitian dapat diukur secara konsisten dan objektif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam enam bab utama, yaitu BAB I hingga BAB VI. Dalam setiap bab disusun secara runtut agar pembahasan dapat dipahami dengan mudah.

1. Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.
2. BAB II adalah Landasan Teori, Landasan teori mencakup penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian. Bab ini meliputi kajian terhadap variabel atau sub variabel yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian yang diambil atau dikutip dari publikasi ilmiah, seperti buku, jurnal penelitian, situs resmi, atau disertasi.
3. Bab III menjelaskan Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.
4. Bab IV adalah Hasil Penelitian, yaitu meliputi deskripsi data yang telah dikumpulkan serta pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian.
5. BAB V merupakan Pembahasan, menyajikan penjelasan serta penguatan atas temuan penelitian, selanjutnya membandingkan temuan penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu yang kredibel.

6. BAB VI adalah Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan kebenaran temuan atau hipotesis. Bab ini juga berisi tentang saran berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para pengelola objek atau subjek penelitian kepada peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan.